

Analisis *Collaborative Governance* dalam Penanganan Bencana Alam Tanah Longsor di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta

Muhammad Arif Abdurrahman^{1*}

¹Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: *m.arfabdurr@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 10, 2025

Revised Januari 15, 2025

Accepted Januari 20, 2025

Available online Januari 24, 2025

Kata Kunci:

Collaborative Governance,
Penanganan Bencana, Tanah
Longsor, Mitigasi Bencana

Keywords:

*Collaborative Governance, Disaster
Management, Landslides, Disaster
Mitigation*

ABSTRAK

Penanganan bencana alam, khususnya tanah longsor, di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, memerlukan pendekatan yang efektif dan kolaboratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *collaborative governance* dalam mitigasi bencana, dengan fokus pada identifikasi kendala dan peluang yang dihadapi oleh pemangku kepentingan. Kecamatan Tegalwaru, yang memiliki potensi gerakan tanah yang tinggi, menghadapi risiko bencana yang meningkat akibat curah hujan yang tinggi dan erosi. Meskipun terdapat berbagai kebijakan yang mengatur penanggulangan bencana, implementasinya masih belum terintegrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialog tatap muka antar pemangku kepentingan merupakan langkah penting dalam membangun

kepercayaan dan komitmen, serta menciptakan solusi yang berkelanjutan. Rekomendasi strategis diusulkan untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam di wilayah tersebut.

ABSTRACT

The handling of natural disasters, particularly landslides, in Tegalwaru District, Purwakarta Regency, required an effective and collaborative approach. This study aimed to analyze the implementation of collaborative governance in disaster mitigation, focusing on identifying the constraints and opportunities faced by stakeholders. Tegalwaru District, which had a high potential for land movement, faced an increasing risk of disasters due to heavy rainfall and erosion. Despite various policies regulating disaster management, their implementation remained not fully integrated. Therefore, collaboration among the government, the community, and the private sector became crucial to enhance the effectiveness of disaster response. This study employed a descriptive qualitative method, collecting data through observation, interviews, and document analysis. The results indicated that face-to-face dialogue among stakeholders was an important step in building trust and commitment, as well as creating sustainable solutions. Strategic recommendations were proposed to strengthen collaboration and improve community preparedness in facing natural disasters in the region.

PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi geografis yang sangat beragam, mencakup dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, perbukitan, sungai, hingga laut. Keberagaman geografis ini menjadikan Jawa Barat sebagai wilayah yang rawan bencana alam. Bencana yang sering terjadi meliputi banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan kebakaran hutan. Faktor-faktor penyebab bencana tersebut antara lain hujan deras, cuaca ekstrem, kondisi tanah yang tidak stabil, dan aktivitas manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Selain itu, perubahan iklim turut memperburuk ancaman bencana dengan meningkatkan intensitas dan frekuensinya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (2017), hampir seluruh wilayah di Jawa Barat memiliki potensi

bencana dengan banyak area masuk dalam kategori zona merah, yaitu tingkat kerawanan bencana tertinggi. Selama Januari hingga Desember 2023, tercatat berbagai bencana alam di Jawa Barat, termasuk tanah longsor sebanyak 465 kejadian, banjir 187 kejadian, angin kencang 624 kejadian, gempa bumi 37 kejadian, kebakaran lahan 709 kejadian, dan kekeringan sebanyak 27 kejadian.

Salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana menengah hingga tinggi di Jawa Barat adalah Kabupaten Purwakarta. Kabupaten ini terletak di antara $107^{\circ}30'$ – $107^{\circ}40'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}25'$ – $6^{\circ}45'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah sekitar 97.172 hektar atau 971,72 km², yang mencakup 2,81 persen dari total luas Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini memiliki potensi geologi berupa batu kali, andesit, kapur, tanah lempung, pasir kuarsa, tras, fosfat, barit, dan batu gips. Sebagian besar jenis tanahnya adalah latosol, sementara sebagian kecil terdiri dari aluvial, andosol, grumosol, litosol, podsolik, dan regosol. Potensi geologi ini telah mendorong maraknya kegiatan pertambangan, yang secara langsung meningkatkan risiko tanah longsor di daerah tersebut.

Tanah longsor sendiri merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia, terutama saat musim hujan. Bencana ini terjadi akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng, sehingga massa tanah atau batuan bergerak turun atau keluar dari lereng. Menurut data BNPB, sejak 2010 hingga Februari 2018, telah terjadi 3.753 kejadian tanah longsor di Indonesia, dengan korban jiwa mencapai 1.661 orang. Sejak 2014, tanah longsor bahkan dinyatakan sebagai bencana paling mematikan di Indonesia. Salah satu faktor utama meningkatnya jumlah korban jiwa adalah padatnya penduduk di wilayah rawan longsor, yang sering kali membangun pemukiman di bawah lereng-lereng berisiko tinggi. Hingga saat ini, tercatat sekitar 40,9 juta penduduk Indonesia tinggal di wilayah dengan tingkat kerawanan tanah longsor skala sedang hingga tinggi, sehingga mitigasi bencana menjadi prioritas yang mendesak.

Penanganan bencana alam di Indonesia sering kali menjadi sorotan masyarakat, terutama terkait kurangnya kesiapan pemerintah dalam menangani dampak yang ditimbulkan. Masyarakat korban bencana kerap mengeluhkan respons pemerintah yang dirasa lambat dan terfragmentasi. Penanganan bencana yang hanya bersifat parsial tanpa kebijakan yang integral serta lemahnya koordinasi antar departemen menjadi faktor utama yang disorot. Selain itu, proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit juga memperburuk persepsi masyarakat mengenai ketidakresponsifan pemerintah dalam mengelola dampak pascabencana.

Pada awal tahun 2024, masyarakat Purwakarta digemparkan oleh bencana tanah longsor yang terjadi di Kampung Pamalayan, RT 008, RW 004, Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Kejadian tersebut berlangsung pada Kamis, 4 Januari 2024, pukul 16.30 WIB. Tanah longsor yang terjadi merupakan jenis longsor yang diawali dengan banjir campur lumpur, dan menjadi salah satu peristiwa longsor terbesar serta terluas di wilayah tersebut. Bencana ini juga berpotensi memicu banjir bandang di alur lembah yang terdampak. Selain itu, di bagian timur, tepatnya di Kampung Pasir Muncang, Desa Sukamulya, terjadi gerakan tanah tipe rayapan yang menambah kerawanan di wilayah tersebut.

Kecamatan Tegalwaru memiliki luas 73,23 km² atau sekitar 7,54 persen dari total luas Kabupaten Purwakarta, dengan jumlah penduduk mencapai ±55.333 jiwa yang tersebar di 13 desa, 85 RW, dan 187 RT. Berdasarkan kajian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, wilayah ini memiliki potensi gerakan tanah yang tergolong dalam zona menengah hingga tinggi. Hal ini berarti gerakan tanah atau longsor berisiko tinggi terjadi, terutama di daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan. Curah hujan yang tinggi serta erosi yang kuat

semakin meningkatkan risiko aktifnya kembali gerakan tanah baru maupun lama di wilayah tersebut. Dengan kondisi ini, mitigasi bencana dan koordinasi antar pihak terkait menjadi prioritas untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan.

Penanganan bencana alam di Indonesia telah diatur melalui berbagai kebijakan, namun implementasinya masih belum berjalan secara integral, holistik, dan komprehensif. Situasi ini menuntut adanya kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah, stakeholder non-pemerintah, dan masyarakat dalam pengelolaan bencana. Terjadinya bencana alam sering kali tidak dapat diprediksi, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis berupa antisipasi yang menyeluruh dan berkelanjutan (Wandi, Adha, & Asriyah, 2019). Pendekatan *collaborative governance* diharapkan dapat menjadi solusi penanggulangan bencana dengan memetakan kompleksitas pemangku kepentingan, sehingga memperkuat peran pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program yang relevan. Dalam konteks bencana tanah longsor di Kabupaten Purwakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan sebagai koordinator, regulator, dan fasilitator. Peran swasta mencakup penyediaan sarana, pembentukan regu penanganan bencana, serta pelaporan dan pengawasan. Sementara itu, masyarakat berperan sebagai katalisator melalui pencegahan dini dan monitoring.

Namun, berdasarkan fenomena di lapangan, implementasi *collaborative governance* dalam tanggap darurat bencana tanah longsor di Kecamatan Tegalwaru masih belum optimal. Beberapa indikasi yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut: (1) Dialog tatap muka antar-stakeholder belum dilakukan secara maksimal oleh BPBD Kabupaten Purwakarta, sehingga konsensus atau kesepakatan bersama terkait pengelolaan bencana belum tercapai secara efektif; (2) Proses pembangunan kepercayaan antar-stakeholder masih rendah, yang ditunjukkan oleh minimnya kepercayaan dalam kolaborasi penanganan bencana; (3) Komitmen dan konsistensi yang ditunjukkan oleh stakeholder masih cenderung berorientasi pada tugas masing-masing tanpa pendekatan kolaboratif; (4) Rendahnya pemahaman dan kesadaran stakeholder terhadap konsep *collaborative governance* menyebabkan proses kolaborasi tidak berjalan optimal; dan (5) Perubahan pola pikir masyarakat terkait penggunaan dan pengelolaan lahan di wilayah rawan longsor masih belum optimal, sehingga menambah risiko terjadinya bencana.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *collaborative governance* dalam penanganan bencana alam tanah longsor di Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta. Dengan mengidentifikasi kendala dan peluang dalam implementasi kolaborasi antar-pemangku kepentingan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "*Analisis Collaborative Governance dalam Penanganan Bencana Alam Tanah Longsor di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta.*"

TINJAUAN PUSTAKA

Collaborative governance merupakan pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam sebuah forum untuk bekerja sama secara kolektif dalam merumuskan kebijakan publik dan manajemen publik. Model ini dapat digambarkan secara ilmiah sebagai proses abstraksi dari dunia nyata melalui peta, diagram organisasi, persamaan matematika, dan bentuk lainnya untuk memahami fenomena kompleks yang sulit dianalisis secara langsung (Quade, 1977). Sebagai alat analisis, model ini mencerminkan fenomena nyata dan membantu menyederhanakan kompleksitas untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas terhadap situasi yang ada.

Ansell dan Gash (2008) menyatakan bahwa selama dua dekade terakhir, strategi pemerintahan baru yang disebut *collaborative governance* telah dikembangkan. Strategi ini mengintegrasikan berbagai pemangku kebijakan dalam forum bersama lembaga publik untuk membangun kebijakan yang berorientasi pada konsensus. *collaborative governance* muncul karena pemerintah sering kali tidak dapat mengandalkan kapasitas internalnya sendiri untuk menjalankan kebijakan dan program. Keterbatasan sumber daya dan jaringan mendorong pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak lain. *Collaborative governance* hadir sebagai respons terhadap kegagalan implementasi, tingginya biaya operasional, dan politisasi regulasi sektor publik. Dalam konteks ini, *collaborative governance* menjadi instrumen yang relevan untuk menciptakan kepemilikan bersama atas masalah yang ada melalui pendekatan berbasis konsensus.

Ansell dan Gash (2008) mengembangkan model *collaborative governance* yang mencakup enam kriteria utama: (1) forum kolaborasi harus diinisiasi oleh lembaga publik atau institusi; (2) forum melibatkan aktor di luar organisasi pemerintah, termasuk swasta dan masyarakat; (3) partisipan secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan, bukan hanya berkonsultasi dengan pemerintah; (4) forum harus terorganisasi secara formal dan melaksanakan pertemuan kolektif secara teratur; (5) forum bertujuan untuk mencapai keputusan berbasis konsensus, meskipun dalam situasi tertentu hasil yang ditetapkan tetap harus dicapai; dan (6) fokus utama kolaborasi adalah formulasi kebijakan publik atau manajemen publik. Model ini menekankan pentingnya forum yang terstruktur dengan baik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta mendorong pengambilan keputusan bersama yang mencerminkan aspirasi semua pihak (Islamy, 2018:15).

Berkaitan dengan pernyataan tersebut, peneliti membatasi pada proses *collaborative governance* sebagaimana dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Proses ini mencakup lima elemen penting yang menjadi landasan kolaborasi antar pemangku kepentingan, yaitu:

1) *Face-to-Face Dialogue*

Proses *collaborative governance* dibangun di atas dialog tatap muka antar pemangku kepentingan. Sebagai proses yang berorientasi pada konsensus, dialog langsung diperlukan untuk menciptakan komunikasi yang intensif guna mengidentifikasi peluang untuk mencapai keuntungan bersama. Namun, dialog tatap muka tidak hanya sekadar media untuk bernegosiasi, tetapi juga berperan dalam menghilangkan stereotip, hambatan komunikasi, dan prasangka yang sering kali menghalangi eksplorasi solusi bersama. Dialog ini menjadi inti untuk membangun kepercayaan, saling menghormati, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses kolaborasi.

2) *Trust Building*

Ketiadaan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan sering kali menjadi tantangan awal dalam proses *collaborative governance*. Oleh karena itu, proses kolaborasi tidak hanya berfokus pada negosiasi, tetapi juga pada upaya membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Para pemimpin kolaborasi yang efektif menyadari pentingnya waktu dan strategi dalam membangun kepercayaan yang kokoh. Kepercayaan ini menjadi elemen kunci untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proses kolaboratif.

3) *Commitment to the Process*

Komitmen terhadap proses kolaborasi mengacu pada kesediaan para pemangku kepentingan untuk menghormati hasil musyawarah, meskipun keputusan yang diambil mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Tingginya tingkat ketergantungan antar pemangku kepentingan akan memperkuat komitmen terhadap kolaborasi

yang berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi *collaborative governance* sangat cocok diterapkan pada situasi yang membutuhkan kerja sama jangka panjang.

4) *Shared Understanding*

Proses kolaborasi membutuhkan pemahaman bersama (*shared understanding*) untuk menyatukan persepsi mengenai substansi dan tujuan kolaborasi. Ansell dan Gash (2008) menyebut pemahaman bersama ini melibatkan misi bersama, tujuan yang jelas, dan arah yang tegas. Pemahaman bersama mencakup kesepakatan mengenai definisi masalah, pengetahuan relevan, dan nilai-nilai umum yang diperlukan untuk mencari solusi atas masalah. Apabila pemangku kepentingan gagal mengidentifikasi masalah bersama, maka sulit untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.

5) *Intermediate Outcomes*

Indikator ini mengacu pada hasil antara (*intermediate outcomes*) yang dicapai selama proses kolaborasi. Capaian minimal ini penting sebagai modal awal untuk membangun kepercayaan dan komitmen di antara para pemangku kepentingan. Selain itu, hasil antara ini berfungsi sebagai acuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses kolaborasi, sehingga mendorong terciptanya siklus kolaborasi yang lebih baik di masa mendatang.

Proses-proses tersebut menjadi kerangka utama dalam *collaborative governance* untuk menciptakan sinergi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif, yang dipilih untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan (Creswell, 2014:4). Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen, literatur, dan referensi yang relevan (Moleong, 2000:112). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode. Pertama, metode observasi partisipan, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari sumber data, sehingga tidak hanya mengamati, tetapi juga ikut merasakan pengalaman mereka secara langsung. Dengan observasi partisipan, data yang diperoleh menjadi lebih lengkap, tajam, dan mampu menggali makna di balik perilaku yang tampak (Moleong, 2000). Kedua, metode wawancara mendalam yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, dan perasaan. Wawancara adalah proses percakapan antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan informasi, yang bertujuan untuk mengonstruksi pemahaman mengenai fenomena yang diteliti (Bungin, 2007:115). Ketiga, metode dokumentasi yang digunakan untuk mencatat peristiwa yang telah berlalu, baik dalam bentuk tulisan seperti catatan harian, peraturan, atau kebijakan, maupun dalam bentuk gambar seperti foto, sketsa, atau karya monumental seperti patung dan film. Dokumentasi melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara (Sugiyono, 2009:240).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yang berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data mentah menjadi data

yang relevan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan interpretasi. Selanjutnya, kesimpulan dibuat berdasarkan analisis data yang telah disusun, baik secara eksplisit maupun implisit (Moleong, 2011:326). Metode ini memastikan data yang dihasilkan bersifat akurat dan mampu memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dialog Tatap Muka Antar Stakeholders (*Face to Face Dialogue*)

Dialog dalam proses kolaborasi adalah tahapan penting yang berorientasi pada lahirnya konsensus atau kesepakatan bersama. Dialog tatap muka tidak hanya berfungsi sebagai media negosiasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi peluang dan menciptakan kondisi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir antagonisme dan rasa tidak hormat (*disrespect*) antara stakeholders, sehingga tujuan bersama dan kebermanfaatannya dapat tercapai. Dialog semacam ini menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan, pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses kolaborasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, proses dialog tatap muka dalam penanganan bencana alam di Kabupaten Purwakarta melibatkan tiga kelompok utama stakeholders: (1) Pemerintah Daerah sebagai leading sector yang mencakup BPBD, Dinas PUTR, BNPB, dan TNI-POLRI; (2) pihak swasta, seperti PT. MMS yang berada di sekitar lokasi bencana; dan (3) masyarakat yang diwakili oleh Relawan Bencana serta LSM. Namun, dari hasil observasi dan wawancara mendalam, ditemukan bahwa komunikasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat kurang berjalan secara lancar dan konsisten. Komunikasi ini cenderung tidak berkesinambungan di semua fase penanganan bencana.

Salah satu permasalahan yang teridentifikasi adalah adanya monopoli oleh kelompok tertentu, yang terjadi karena tidak semua stakeholders memiliki kapasitas, sumber daya, atau status yang setara. Masyarakat sering merasa diposisikan sebagai objek program, sementara pemerintah merasa sebagai pemberi utama. Ketidakseimbangan ini menyebabkan proses dialog tatap muka sering kali hanya terkesan sebagai formalitas dan rentan terhadap penyimpangan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ansell dan Gash (2008) yang menyebutkan bahwa jika beberapa stakeholders tidak memiliki kapasitas, organisasi, status, atau sumber daya yang setara, maka proses *collaborative governance* akan rentan terhadap manipulasi oleh aktor yang lebih kuat.

Kondisi tersebut terbukti dalam pelaksanaan rapat koordinasi yang hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Rapat tersebut tidak efektif karena waktu yang tersedia sangat terbatas untuk membahas berbagai permasalahan terkait penanganan bencana. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing stakeholders cenderung berjalan secara sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi yang baik. Akibatnya, proses sosialisasi menjadi tidak efektif dalam menyampaikan informasi maupun membangun kesepahaman di antara pihak-pihak yang terlibat.

Pembangunan Kepercayaan Dari Stakeholders

Membangun kepercayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses dialog dalam kolaborasi. Para pemimpin kolaborasi harus memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Proses ini memerlukan waktu dan komitmen yang tinggi, serta harus dilakukan secara berkelanjutan. Dalam konteks penanggulangan bencana, siklus yang utuh harus dilalui, mencakup berbagai fase seperti pencegahan, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan.

Pembangunan kepercayaan antara masyarakat, pemerintah, dan stakeholders lainnya sangat penting, karena hal ini dapat meningkatkan respons masyarakat dan mendorong strategi yang lebih efektif dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana.

1) Kepercayaan Pada Tahap Pencegahan

Menurut Ansell dan Gash (2008), pembangunan kepercayaan (*trust building*) merupakan tahapan yang tak terpisahkan dari dialog tatap muka (*face to face dialogue*). Stakeholders dalam kolaborasi harus membangun kepercayaan di antara mereka, sehingga kepercayaan tersebut dapat mengurangi rasa curiga dan memperkuat komitmen mereka. Hal ini akan membuat proses kolaborasi menjadi lebih mudah dan efektif. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Purwakarta menunjukkan bahwa para stakeholders dalam penanganan bencana tanah longsor sudah saling mempercayai. Pemerintah, misalnya, mempercayai kepada stakeholders lainnya untuk menangani bencana tanah longsor dan bahkan menerima inovasi yang diajukan dalam penanganan bencana tersebut.

2) Kepercayaan Pada Tahap Kesiapsiagaan

Tahap kesiapsiagaan ditandai dengan berbagai kegiatan penting yang mendukung kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelatihan, penyediaan peralatan, latihan, evaluasi, dan identifikasi tindakan perbaikan yang terkait dengan risiko bencana. Fokus utama dalam tahap ini adalah memahami potensi dampak bencana terhadap masyarakat dan bagaimana informasi, pendidikan, serta pelatihan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merespons dan memulihkan diri dari bencana. Dalam tahap kesiapsiagaan, kepercayaan memainkan peran yang sangat penting dalam memfasilitasi penanganan bencana yang lebih baik.

Berdasarkan wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan peneliti, peringatan dini terhadap potensi bencana longsor di Kabupaten Purwakarta telah dilakukan oleh BPMD, namun hal tersebut sering diabaikan oleh masyarakat. Penyebabnya adalah keterbatasan pilihan tempat tinggal serta adanya rasa memiliki terhadap lahan yang mereka tempati. Oleh karena itu, untuk membangun kepercayaan yang kuat, diperlukan upaya untuk menjalin hubungan emosional yang positif dengan masyarakat. Hal ini akan menumbuhkan rasa aman dan terlindungi di antara individu, mendorong masyarakat untuk menetap di tempat yang lebih aman, serta memperkuat rasa percaya antara masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

3) Kepercayaan Pada Fase Respon

Tahap respons bencana mencakup koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia dan fisik, dengan fokus utama pada memastikan keselamatan masyarakat. Mengingat bahwa peristiwa traumatis sering membangkitkan emosi negatif yang sangat kuat, penting untuk menanamkan rasa percaya yang positif di antara individu selama fase yang sulit ini. Kepala BPBD menjelaskan bahwa pada tahap respons bencana, kepercayaan masyarakat serta institusi terkait berjalan dengan baik. Di komunitas yang dicirikan oleh kepercayaan, solidaritas, dan partisipasi aktif yang kuat, respons terhadap bencana cenderung lebih efektif. Warga di komunitas tersebut cenderung saling membantu dengan berbagi sumber daya, menyediakan tempat berteduh, menawarkan dukungan finansial, membantu dalam kesiapsiagaan bencana melalui informasi peringatan dini, serta memberikan dukungan emosional.

Peran utama ketahanan masyarakat dalam fase respons sangat vital, terutama ketika bantuan eksternal terbatas. Dalam kondisi ini, masyarakat menjadi agen proaktif, dengan tingkat

kepercayaan dan kapasitas ketahanan mereka memainkan peran penting dalam memastikan kelangsungan hidup masyarakat setelah bencana. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi peristiwa kritis memerlukan tingkat kepercayaan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa anggota masyarakat yang kompeten siap memberikan bantuan. Fondasi kepercayaan dan keterpercayaan ini bertumpu pada kompetensi anggota lembaga dalam menanggapi peristiwa, menjaga komunikasi yang transparan, menunjukkan perhatian yang tulus terhadap warga, dan memastikan bahwa kualitas layanan sesuai dengan harapan masyarakat.

4) Kepercayaan Pada Fase Pemulihan

Tahap pemulihan dimulai segera setelah bencana berakhir, dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi normal di wilayah dan individu yang terdampak, serta menerapkan strategi mitigasi untuk mengurangi potensi dampak bencana dan keadaan darurat di masa depan. Dalam fase ini, stakeholders harus terus membangun rasa kepercayaan satu sama lain, karena kepercayaan yang terjalin dapat mengurangi rasa curiga dan memperkuat komitmen mereka untuk berkolaborasi. Proses kolaborasi yang baik akan tercipta ketika rasa kepercayaan ini dipupuk dan dipelihara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan bencana tanah longsor di Kabupaten Purwakarta, para stakeholders telah saling mempercayai. Pemerintah telah mempercayakan kepada stakeholders lain untuk menangani bencana tanah longsor dan menerima inovasi-inovasi yang diajukan dalam penanganan bencana tersebut. Selain itu, stakeholders lainnya juga mempercayai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan bencana tanah longsor di Kabupaten Purwakarta dan turut berperan serta dalam pelaksanaan program tersebut sebagai bentuk kerjasama dalam proses kolaborasi.

Komitmen Bersama Serta Konsistensi Pelaksanaan (*Commitment to the Process*)

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi di antara para pemangku kepentingan berpotensi meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Penting untuk ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah sekadar kesepakatan sekali waktu, melainkan sebuah proses kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. BPBD Kabupaten Purwakarta mengakui bahwa dalam komitmen untuk mencapai tujuan keterbukaan, sudah tercipta hubungan yang terbuka antara pemerintah dan semua pihak yang terlibat, begitu juga dengan stakeholders lainnya.

Stakeholders telah menunjukkan perasaan saling membutuhkan, kebersamaan, dan transparansi dalam proses kolaborasi penanganan bencana tanah longsor di Kabupaten Purwakarta. Namun, menurut pandangan stakeholders lainnya, baik pihak swasta maupun masyarakat, keterbukaan yang dirasakan dari BPBD masih terbatas pada transparansi terkait program-program penanganan bencana saja, belum pada aspek-aspek lainnya. Meskipun demikian, BPBD telah terbuka mengenai program yang akan dilakukan. Namun, keterbukaan untuk saling mengetahui kekurangan yang ada masih terbatas, sehingga kendala dan hambatan yang dihadapi sulit untuk diidentifikasi dan diselesaikan secara bersama. Pihak swasta berharap agar BPBD lebih terbuka mengenai tantangan yang dihadapi dan dapat berbagi informasi tersebut dengan stakeholders lainnya.

***Share Understanding* (Kondisi Pembangunan Kesepahaman Para Stakeholder)**

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama mengenai apa yang dapat dicapai. Pemahaman bersama ini mencakup adanya tujuan yang

jas, definisi masalah yang dihadapi bersama, serta kesepahaman mengenai nilai yang ingin dicapai dalam berkolaborasi. Kondisi saling ketergantungan yang tinggi di antara para pemangku kepentingan berpotensi meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Namun, perlu ditekankan bahwa kolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali, melainkan sebuah proses kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pemahaman masalah antara stakeholders. Meskipun visi dan misi telah dipahami dengan baik, pemahaman mengenai masalah yang dihadapi belum sepenuhnya berhasil. Terdapat dua isu utama yang perlu dicermati: pertama, isu yang dihadapi oleh pemerintah terkait kewilayahan yang tidak dapat dijangkau langsung oleh BPBD karena kewenangannya berada pada dinas/lembaga lain; dan kedua, isu dari masyarakat yang masih kurang memiliki kesadaran tentang bencana tanah longsor, seperti pembangunan dan aktivitas masyarakat di daerah rawan longsor.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dianalisis bahwa hasil penelitian pada tahapan *shared understanding* belum sepenuhnya sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ansell dan Gash (2008), yang menyatakan bahwa stakeholders harus memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang dihadapi dalam proses kolaborasi. Proses kolaborasi dalam penanganan bencana tanah longsor di Kabupaten Purwakarta belum berjalan optimal, di mana pemahaman mengenai masalah di antara stakeholders cenderung terkotak-kotak berdasarkan visi masing-masing. Oleh karena itu, meskipun tahapan ini berjalan, pemahaman bersama tersebut belum mencapai tingkat yang optimal.

Intermediate Outcomes (Kondisi Rencana Strategis serta Terobosan dan Inovasi-Inovasi)

Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan kolaborasi dapat dirasakan secara nyata, meskipun masih kecil, sebagai hasil antara (*pertengahan*) dari proses kolaborasi. Hasil kecil (*small win*) ini dapat menjadi pendorong penting dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama antara para pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil antara dari proses kolaborasi penanganan bencana antara lain adalah normalisasi kehidupan warga yang terkena dampak bencana. Sementara itu, pada tahapan rencana dan strategi, terobosan inovasi penanggulangan kebencanaan yang muncul meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemajuan kebudayaan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keluarga berencana (KB), pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, pengembangan koperasi dan UMKM, peningkatan nilai investasi, usaha industri, dan perdagangan, peningkatan dan pemerataan infrastruktur dasar di semua wilayah, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Terobosan-terobosan ini menunjukkan bahwa meskipun hasil kolaborasi pada tahap ini belum mencapai hasil yang besar, namun langkah-langkah tersebut merupakan fondasi yang penting untuk mendorong perkembangan lebih lanjut dalam penanggulangan bencana.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat *Collaborative Governance* dalam Penanganan Bencana di Kabupaten Purwakarta

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung utama dalam manajemen kolaboratif penanggulangan bencana di Kabupaten Purwakarta adalah adanya kerjasama yang solid serta kesadaran dari semua lembaga pemerintah yang terkait, lembaga non-pemerintah, dan unsur masyarakat. Kesadaran akan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta perlunya kolaborasi

menjadi landasan yang sangat penting dalam upaya penanggulangan bencana. Kolaborasi yang baik antara pihak-pihak ini menunjukkan adanya pemahaman bersama mengenai pentingnya tindakan kolektif dalam menangani bencana.

Menurut keterangan dari para informan yang diwawancarai, terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Purwakarta. Salah satu faktor penghambat utama adalah ketidakseimbangan sumber daya di antara para stakeholder, yang disebabkan oleh keterbatasan SDM, peralatan, serta anggaran. Dengan demikian, faktor penghambat utama bukanlah konflik antar stakeholder atau perbedaan sumber daya yang dimiliki, melainkan keterbatasan dalam hal kapasitas dan sumber daya yang ada. Hal ini sesuai dengan teori Ansell dan Gash (2008), yang menyebutkan bahwa ketidakseimbangan sumber daya atau kekuatan antar stakeholder dapat menghambat proses kolaborasi, terutama apabila terdapat perbedaan imbalan atau sejarah konflik di masa lalu.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses *collaborative governance* penanggulangan bencana di Kabupaten Purwakarta dilakukan secara internal dan eksternal. Upaya internal mencakup evaluasi berkala, stok opname, penambahan anggaran bencana, peningkatan jumlah personil, serta pengadaan alat bantu, seperti alat deteksi dini. Sementara itu, upaya eksternal melibatkan kegiatan seperti reboisasi (penghijauan), sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pola tanam yang benar dan pembangunan rumah sesuai dengan rencana tata ruang. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan semua elemen terkait, menumbuhkan komitmen untuk bekerja sama dalam penanggulangan bencana, serta membangun komunikasi yang lebih intensif untuk memperkuat ikatan emosional antar stakeholder. Strategi ini juga melibatkan pembentukan rasa empati dan memberikan ucapan terima kasih kepada semua elemen, terutama kepada pihak-pihak di luar lembaga pemerintahan, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan yang telah diberikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Purwakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut: Proses *collaborative governance* dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Purwakarta secara keseluruhan belum optimal. Pada fase pencegahan, respons, dan pemulihan, dialog antar stakeholders sudah berjalan cukup baik, namun pada fase pengembangan, kolaborasi masih cenderung terpisah dan tidak terkoordinasi dengan baik antar stakeholder. Meskipun ada saling kepercayaan antara stakeholder dalam menangani bencana tanah longsor, masyarakat merasa bahwa upaya kolaboratif yang dilakukan oleh BNPB dan institusi terkait masih belum memadai. Komitmen untuk keterbukaan sudah ada, dengan adanya saling ketergantungan dan transparansi antar pihak, namun keterbukaan tersebut masih terbatas pada program-program penanganan bencana dan belum menyentuh aspek lainnya. Selain itu, proses kolaborasi belum optimal pada fase pemulihan dan pengembangan, dengan adanya kesepahaman yang terkotak-kotak di antara stakeholder, yang menyebabkan aksi mereka berjalan sendiri-sendiri. Hasil antara yang dicapai masih terbatas pada normalisasi kehidupan masyarakat terdampak bencana, sedangkan inovasi masih terkendala oleh kesenjangan dalam mitigasi, sumber daya manusia, implementasi, peran ahli kebencanaan, dan anggaran.

Faktor pendukung utama dalam proses *collaborative governance* adalah adanya komunikasi, komitmen, dan pemahaman yang baik antar stakeholder, yang diwujudkan dalam kerjasama dan kesadaran akan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam penanggulangan bencana. Faktor

penghambat utama adalah ketidakseimbangan sumber daya, terutama keterbatasan SDM, peralatan, dan anggaran. Untuk mengatasi hambatan tersebut, strategi yang diterapkan mencakup upaya internal dan eksternal. Upaya internal melibatkan evaluasi, penambahan anggaran dan personil, serta pengadaan alat deteksi dini, sementara upaya eksternal mencakup reboisasi, sosialisasi untuk merubah mindset masyarakat, pengelolaan lahan yang sesuai rencana tata ruang, dan koordinasi yang intensif antar semua elemen. Upaya ini bertujuan untuk membangun komitmen bersama, memperkuat ikatan emosional, serta meningkatkan rasa empati dan apresiasi terhadap dukungan dari berbagai pihak, terutama yang berada di luar lembaga pemerintahan.

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran praktis untuk pihak-pihak terkait, sebagai berikut: BPBD dan stakeholders lainnya perlu meningkatkan kolaborasi dalam penanggulangan bencana tanah longsor dengan memperkuat dialog tatap muka antar stakeholders pada setiap fase, dari pencegahan hingga pemulihan, guna menghindari kecenderungan aktivitas yang berjalan sendiri-sendiri. Selanjutnya, penting untuk mendorong pengembangan kepercayaan baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat, dengan menyusun protokol yang efektif untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Selain itu, penguatan partisipasi aktif masyarakat harus dilakukan dengan merubah mindset dalam menjaga lingkungan, menghindari aktivitas yang merusak kestabilan tanah di daerah rawan longsor. Terakhir, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi kendala dalam penanganan bencana dan mewujudkan inovasi penanggulangan bencana yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2017). *Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana*. Jakarta: BNPB.
- Bungin, Burhan H.M. (2007) *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial*. Jakarta: Kencana Prenama Media Group.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: SAGE.
- Keputusan Bupati Nomor 97 Tahun 2024 Tentang *Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor di Desa Sukamulya dan Desa Cisarua Kecamatan Tegalaru Kabupaten Purwakarta Tahun 2024*
- Lexy, J Moleong. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 18 Tahun 2012 Tentang *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 18)*.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*.
- Quade, E.S. (1977). *Analysis For Public Decisions*. New York: Elseiver.

Wandi, D., Adha, S., & Asriyah, I. (2019). Pengaruh komunikasi terhadap kinerja pegawai pada badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Vokasi*, 2(2), 18-30.